PENYEMPURNAAN
RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN
RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
TAHUN 2018-2023

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

BADAN PENDAPATAN DAERAH

TAHUN 2018-2023

KATA PENGANTAR

Kita panjatkan syukur Alhamdulillah ke hadirat Allah SWT atas limpahan berkah dan rahmad Nya, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk dapat menyelesaikan penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Strategis/Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 – 2023.

Dokumen Penyempurnaan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategis ini merupakan Penyempurnaan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 -2023 yang selaras dengan *Perubahan RPJMD* 2018-2023 Kabupaten Nganjuk

Perubahan Rencana Strategis 2018-2023 Bapenda Kabupaten Nganjuk akan menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsinya *dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah* demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Nganjuk.

Nganjuk,
KEPALA BAPENDA
KABUPATEN NGANJUK

Drs. NUR SOLEKAN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19661227 198602 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

Bab I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 4

1.3 Maksud dan Tujuan 5

1.4 Sistematika Penulisan 6

Bab II Gambaran Pelayanan Badan Pendapatan Daerah 8

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 8

2.2 Sumber Daya 11

2.3 Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah 14

Bab III Permasalahan dan Isu Strategis 23

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bapenda 23

3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 24

3.3 Telaah Rencana Strategis Kementrian/Lembaga dan Renstra Propinsi Jawa timur 24

3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 26

3.5 Penentuan Isu-isu strategis 26

Bab VII Tujuan dan Sasaran 28

4.1 Tujuan 28

4.2 Sasaran 29

Bab V Stategis dan Kebijakan 31

5.1 Strategis 31

5.2 Kebijakan Umum Bapenda 32

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan 35

6.1 Program dan Kegiatan Pembangunan 35

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Pemerintahan 46

Bab VIII Penutup 49

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pasal 15 ayat 1 mengamanatkan bahwa perangkat daerah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.

Sehubungan dengan berjalannya waktu dan adanya kebijakan pemerintah diantaranya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sehingga pemerintah daerah melaksanakan perubahan SOTK yang diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perubahan Perda Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, Sesuai ketentuan Permendagri 90 Tahun 2019 perlu penyesuaian kegiatan dan sub kegiatan pada perencanaan

tahun 2021 sehingga Renstra Badan Pendapatan Daerah Tahun 2018-2023 perlu dilakukan Review/Perubahan.

Penyusunan Review/Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Bapenda Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 dilakukan melalui beberapa langkah perencanaan yang dengan berpedoman pada RPJMD tahun 2018-2023 dan bersifat indikatif. Dalam proses penyusunan Renstra, BAPENDA Kabupaten Nganjuk melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan yang dalam pelaksanaannya memperhatikan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Provinsi dan KLHS serta prinsip pembangunan berkelanjutan.

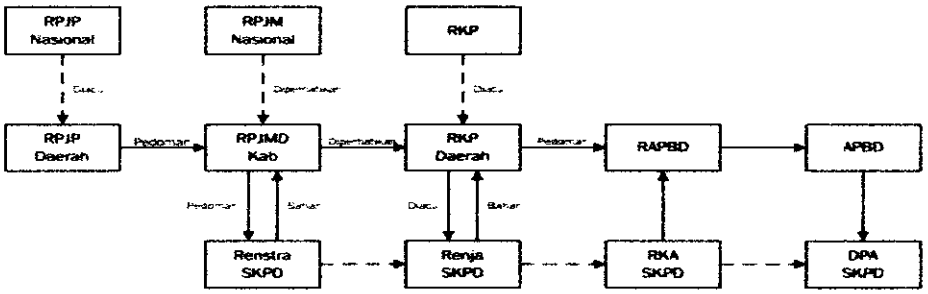
Proses penyusunan Review/perubahan Renstra Badan Pendapatan Daerah tahun 2018-2023 dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu :

a. Persiapan penyusunan Renstra
b. Penyusunan rancangan Renstra
c. Penyusunan rancangan akhir Renstra
d. Penyusunan Renstra Bapenda dilaksanakan oleh tim penyusun yang beranggotakan seluruh pejabat struktural berdasarkan SK Penyusun Review/perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk.

Rancangan Perubahan Renstra Badan Pendapatan Daerah tahun 2018-2023 menyelaraskan dengan dokumen Rencana Perubahan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk (RPJMD) Tahun 2018-2023 yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Dengan demikian diharapkan terwujud hasil akhir dapat menghasilkan dokumen rencana yang sinergis dan terpadu dalam aspek pengelolaan pendapatan daerah sebagai salah satu modal dasar terselenggaranya pembangunan daerah dapat berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna.

Keterkaitan antara Review/perubahan Rencana Strategis Bapenda Kabupaten Nganjuk dengan Perubahan RPJMD Kabupaten

Nganjuk Tahun 2018 - 2023 dapat dilihat pada program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan Bapenda Kabupaten Nganjuk sebagai upaya untuk medukung pencapaian sasaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Nganjuk dengan meningkatkan kemampuan pengelolaan pendapatan daerah yang akuntabel dan berbasis teknologi informasi. Keterkaitan Renstra OPD dengan RPJMD, Renstra Kementrian dan Renstra Provinsi serta dengan Renja OPD digambarkan sebagai berikut :



Review/Perubahan Renstra BAPENDA merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) atau Rencana Kerja (Renja) OPD yang setiap tahunnya menjadi dasar penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang secara formal diformulasikan melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Berdasarkan masukan dalam Musrenbang terhadap Rancangan RKPD, dilakukan penyempurnaan Rancangan RKPD untuk selanjutnya ditetapkan menjadi RKPD.

RKPD tersebut merupakan acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum (KUA) APBD yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya yang selanjutnya menjadi pedoman untuk menyusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Dari KUA dan PPAS yang telah ditetapkan menjadi dasar pembuatan Rencana Kerja Anggaran (RKA) OPD dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) OPD.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Strategis BAPENDA Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 adalah:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Karya;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan Perda tentang Rencana pembangunan jangka panjang daerah dab rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubhan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2005 – 2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 02 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan RPJPD, RPJMD, Rencana Strategis OPD, RKPD dan Rencana Kerja OPD;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perubahan Perda Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud Review/perubahan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah adalah;

1. Menyediakan pedoman perencanaan dibidang Pengelolaan pendapatan Daerah dalam menyusun sasaran, program dan kegiatan pembangunan daerah kurun waktu lima tahun secara menyeluruh, terintegrasi, efisien dan sinergi dengan kebijakan pembangunan daerah;

2. Memberikan arahan rencana tahunan yang dilengkapi dengan indikator dan sasaran kinerja yang jelas dan terukur;
3. Menyediakan tolok ukur untuk evaluasi dan penilaian kinerja;
4. Memberikan gambaran arah kondisi perekonomian daerah yang akan dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi.

Tujuan penyusunan Review / Perubahan Rencana strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah adalah;

1. Meningkatkan kualitas pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna;
2. Mengarahkan dan menselaraskan setiap rencana pembangunan guna mencapai tujuan dan sasaran pembangunan secara bertahap dan berkesinambungan.

1.4. Sistematika Penulisan

Review Rencana Strategis BAPENDA Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN
- I. 1. Latar Belakang
- I. 2. Landasan Hukum
- I. 3. Maksud dan Tujuan
- I. 4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
- II. 1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- II. 2. Sumber Daya Badan Pendapatan Daerah
- II. 3. Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah
- II. 4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
- III. 1. Identifikasi Permasalahan Beradasarkan Tugas & fungsi Pelayanan

III. 2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih
III. 3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah
III. 4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
III. 5. Penentuan Isu-isu strategis
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN RENCANA KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

BADAN PENDAPATAN DAERAH

II.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah merupakan unsur penunjang dalam bidang keuangan yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu Kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti.

Secara rinci berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk No 8 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk

1. Tugas Pokok BAPENDA

Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang pendapatan.

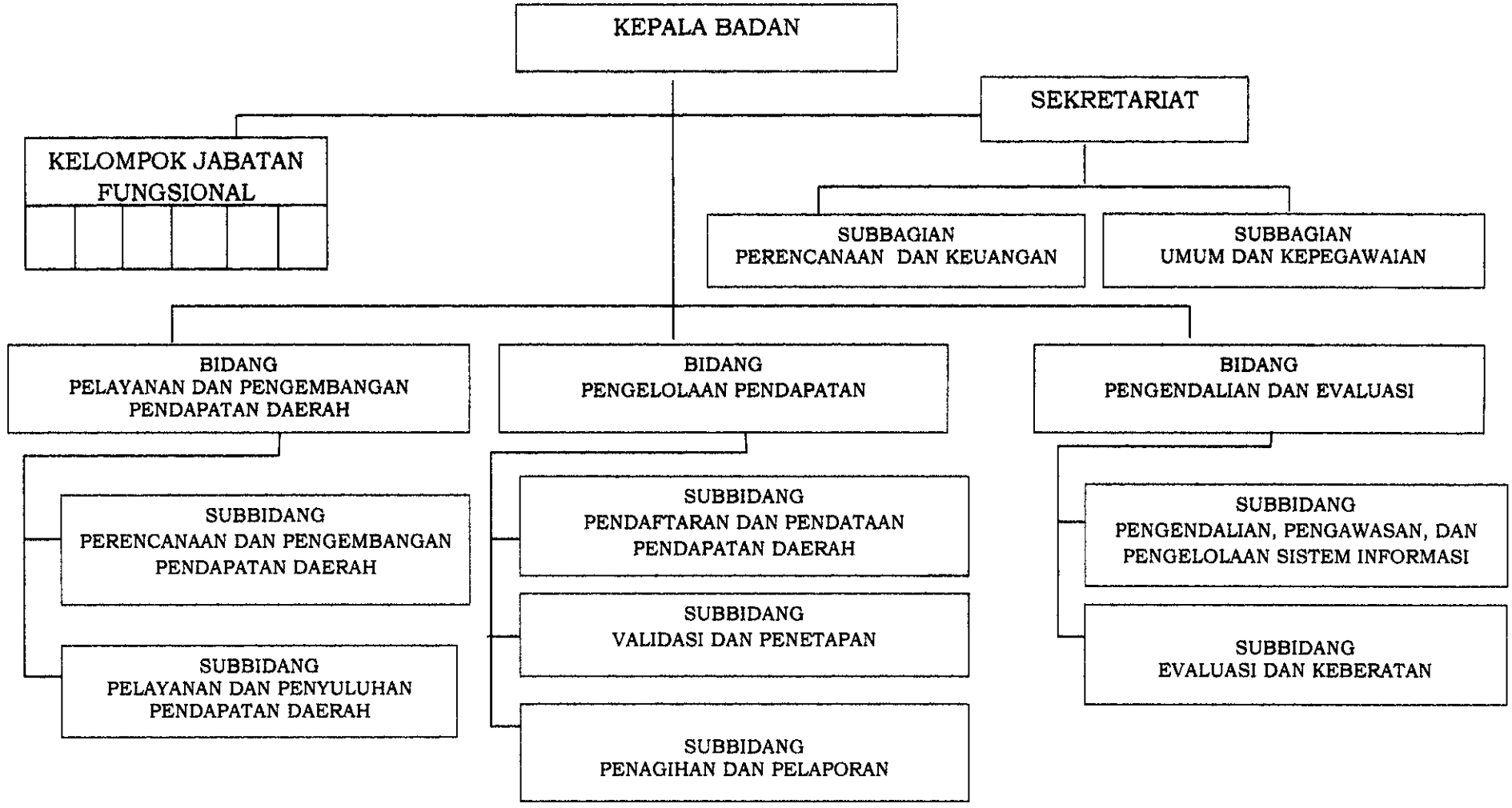
2. Fungsi BAPENDA

Badan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan;
b. Pelaksanaan kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang pendapatan;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendapatan;
d. Pelaksanaan administrasi Badan Pendapatan Daerah;
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Unit Organisasi Bersifat Khusus Kabupaten Nganjuk, sebagaimana bagan struktur organisasi berikut:


KEPALA BADAN
SEKRETARIAT
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
BIDANG PELAYANAN DAN PENGEMBANGAN PENDAPATAN DAERAH
BIDANG PENGELOLAAN PENDAPATAN
BIDANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI
SUBBIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PENDAPATAN DAERAH
SUBBIDANG PELAYANAN DAN PENYULUHAN PENDAPATAN DAERAH
SUBBIDANG PENDAFTARAN DAN PENDATAAN PENDAPATAN DAERAH
SUBBIDANG VALIDASI DAN PENETAPAN
SUBBIDANG PENAGIHAN DAN PELAPORAN
SUBBIDANG PENGENDALIAN, PENGAWASAN, DAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI
SUBBIDANG EVALUASI DAN KEBERATAN

II.2 SUMBER DAYA

A. Sumber Daya Manusia

Keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai sangat dipengaruhi oleh modal sumber daya manusia (human capital) yang dimiliki.Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk didukung oleh sumber daya manusia (pegawai) yang mempunyai latar pendidikan dan dengan struktur kepangkatan yang beragam. Jumlah pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk sebanyak 43 orang. Adapun keragaman jumlah pegawai berdasarkan pendidikan disajikan seperti pada tabel di bawah ini:

Rekapitulasi Jumlah Pegawai Badan Pendapatan Daerah Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	Bidang	PENDIDIKAN					
		SD	SMP	SMA	SI	S2	Jml
1	Sekretariat	0	2	4	6	2	14
2	Pelayanan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	0	0	2	5	1	8
3	Pengelolaan Pendapatan	0	0	6	7	2	15
4	Pengendalian dan Evaluasi	0	0	2	2	3	7
	Jumlah	0	2	13	20	8	44

Berdasarkan data pegawai seperti yang diuraikan pada table diatas, secara umum tingkat pendidikan pegawai Badan Pendapatan Daerah berpendidikan SMP yaitu sebanyak 2 orang, SMA yaitu sebanyak 14 orang, S1 yaitu sebanyak 20 orang, S2 yaitu sebanyak 8 orang, Dengan tingkat pendidikan tersebut hal ini merupakan sebuah potensi yang perlu untuk dikembangkan dari segi SDM sebagai salah satu upaya dalam optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah khususnya dari sektor pajak daerah dan Retribusi Daerah.

Keragaman jumlah pegawai berdasarkan kepangkatan disajikan seperti pada tebel di bawah ini :

Dari SDM yang dimiliki, untuk mendukung pelayanan Bapenda masih diperlukan SDM yang memiliki kualifikasi khusus antara sebagai analis pajak, pemeriksa pajak dan juru sita.

Rekapitulasi Jumlah Pegawai Badan Pendapatan Daerah Berdasarkan Kepangkatan

NO	Bidang	GOLONGAN											
		IV/C	IV/B	IV/A	III/D	III/C	III/B	III/A	II/D	II/C	II/B	I/D	JML
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Sekretariat	1	1	0	2	0	2	2	3	1	0	2	18
2	Pelayanan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	0	0	1	3	1	0	1	1	1	1	0	13
3	Pengelolaan Pendapatan	0	0	1	2	4	0	2	3	1	1	0	17
4	Pengendalian dan Evaluasi	0	0	3	0	1	1	1	1	0	0	0	15
	JUMLAH	1	1	5	7	6	3	6	8	3	2	2	44

Berdasarkan data kepangkatan pegawai seperti pada table diatas, secara umum pegawai Badan Pendapatan Daerah dengan golongan IV sebanyak 7 orang, Golongan III sebanyak 22 orang, Golongan II sebanyak 13 orang dan Golongan I sebanyak 2 orang.

Sesuai dengan peraturan kepegawaian yang berlaku, bahwa untuk menduduki jabatan struktural diwajibkan telah mengikuti pendidikan dan latihan jabatan. Berdasarkan pada pendidikan dan pelatihan kepemimpinan yang telah diikuti, pegawai badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk seperti berikut :

NO	DIKLATPIM	JUMLAH	KETERANGAN
1	Diklatpim II	1	
2	Diklatpim III	3	
3	Diklatpim IV	9	
	Jumlah	*13*	

B. Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi BAPENDA tentunya perlu didukung sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang dimiliki BAPENDA adalah sebagai berikut:

a. Gedung dan Kantor

- Kantor BAPENDA : 1 gedung

b. Alat-alat Angkutan :

- Kendaraan Roda 4 : 8 buah
- Kendaraan Roda 2 : 11 buah

Sarana kendaraan operasional sangat membantu dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BAPENDA, terutama kendaraan roda dua yang menjadi sarana pemungutan pajak daerah oleh petugas pungut yang merupakan ujung tombak penerimaan pajak daerah.Dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah, sangat diperlukan jemput bola kepada wajib pajak yang memerlukan pendekatan untuk meningkatkan kesadaran dalam membayar pajak.Dari 11(sebelas) buah kendaraan dinas roda 4 yang ada, 1 kendaraan digunakan untuk kendaraan operasional pejabat eselon II, 4 kendaraan digunakan sebagai kendaraan operasional pejabat eselon III, 3 kendaraan digunakan untuk Pelayanan Pajak Daerah.Untuk Kendaraan roda 2 yang digunakan pejabat Eselon IV tersedia 11 Unit.Peralatan dan Perlengkapan KantorSelain gedung kantor dan kendaraan operasional yang mendukung, sarana dan prasarana lain yaitu peralatan dan perlengkapan yang lengkap dan memadai juga

sangat mendukung kelancaran tugas. Peralatan dan perlengkapan yang menjadi tanggung jawab BAPENDAsebagian besar kondisinya relatif masih bagus dan untuk mempertahankan kondisi tersebut perlu pemeliharaan rutin. Untuk pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor tetap perlu dilakukan menyesuaikan dengan perkembangan teknologi.

II.3 KINERJA PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH

Kinerja pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk dapat dilihat dari realisasi Pendapatan Asli Daerah dari Tahun 2016 sampai dengan bulan Desember 2020 sebagai tabel berikut :

Target dan Realisasi Pendapatan Tahun 2016 sampai dengan 2020

NO	URAIAN	TA 2020			TA 2019			TA 2018		
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1.	Pendapatan Asli Daerah	323.260.574.754,39	402.347.144.361,43	124,47	357.367.538.593,08	368.272.236.478,28	109,82	345.138.632.616,31	361.586.738.454,12	104,77
2.	Pendapatan Dana perimbangan	1.435.075.828.974,00	1.441.047.387.801,00	100,42	1.577.411.729.591,00	1.556.827.334.981,00	98,70	1.880.567.716.243,00	1.908.660.913.943,00	101,49
3.	Lain-lain pendapatan yang Sah	577.249.296.676,00	592.002.425.917,00	102,56	535.289.234.000,00	587.877.946.896,00	55,87	99.738.600.000,00	99.922.385.400,00	100,18
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		***2.335.585.700.404,39***	***2.435.129.246.169.38***	104,26	***2.470.068.502.184,08***	***2.512.977.518.355,28***	***101,74***	***2.325.444.948.859,31***	***2.370.170.037.797,12***	***101,92***

NO	URAIAN	TA 2017			TA 2016		
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1.	Pendapatan Asli Daerah	328.556.448.594	332.495.541.853	101,20	294.251.949.843	323.045.177.742	110
2.	Pendapatan Dana perimbangan	1.550.270.087.354	1.503.523.174.920	96,98	1.717.786.363.496	1.767.538.236.839	103
3.	Lain-lain pendapatan yang Sah	476.942.251.132	463.740.451.140	97,23	8.910.826.000	6.878.233.400	77
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		2.355.768.787.081	2.299.759.167.913	97,62	2.020.949.139.339	2.097.461.647.981	104

Dari table tersebut diatas menunjukan bahwa realisasi pendapatan selama 5 (lima) tahun mengalami kenaikan kecuali pada tahun 2019 ke Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp 77.848.272.185.90, hal ini dikarenakan adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pemerintah pusat telah menetapkan kebijakan-kebijakan yang ditindaklanjuti pemerintah daerah khususnya pajak daerah antara lain:

- Pengurangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Pemilik Usaha dan Pedagang Pasar di Kabupaten Nganjuk yang berupa pengurangan pajak hotel dan restoran sebesar 100% mulai tgl 23 April sampai dengan 30 Juni 2020.
- Pembebasan biaya tarif listrik bagi konsumen 450 Volt Ampere (VA) dan memberkan diskon pembayaran tagihan hingga 50% kepada konsumen bersubsidi 900 VA mulai dari bulan april sampai dengan desember 2020.
- Social distancing, phisical distancing dan menghentikan operasional moda transportasi yang menyebabkan menurunnya secara drastis penggunaan jalan tol & tidak beroperasinya angkutan kereta api
- Pembatasan kunjungan dan penunggu pasien di rumah sakit
- Pengurangan anggaran terutama untuk penyediaan makan dan minum
- Penutupan tempat dan penyelenggaraan hiburan sertapenghentian aktifitas Olahraga

- ✓ memperkuat ekonomi masyarakat melalui pemberian insentif/stimulus berupa pengurangan/penghapusan pajak dan retribusi daerah bagi pelaku usaha untuk menghindari penurunan produksi dan PHK massal
- ✓ Sosial dan physical distancing oleh pemerintah.

Akan tetapi Kinerja pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk pada tahun 2020 sesuai tujuan dan sasaran yang tercantum dalam Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 yaitu tujuan "*Meningkatnya Kemampuan Pengelolaan Pendapatan Daerah*", dengan indikator *Prosentase PAD terhadap Pendapatan* dengan rumusan penghitungan *pendapatan Asli Daerah dibanding Pendapatan kali 100. dan sasaran Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah* dengan Indikator *Prosentase peningkatan PAD* yang rumusan perhitungannya adalah *Realisasi PAD Tahun berjalan dikurangi* realisasi PAD Tahun lalu dibanding Realisasi PAD Tahun lalu dikali 100% "TERCAPAI"

Capaian kinerja pada tahun 2020 berdasarkan tujuan dan sasaran tersebut sebagaimana table T-C 23 dibawah ini :

Tabel T-C 23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Nganjuk

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target Renstra SKPD Tahun ke					Realisasi Capaian SKPD Tahun ke		Rasio Capaian SKPD Tahun ke	
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2019	2020
		Target	Target	Target	Target	Target	Realisasi	Realisasi	%	%
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(15)	(16)
1	Prosentase PAD Terhadap Pendapatan	14.71	14.80	14.80	14.82	14.85	14.65	16.52	99.6	111.63
2	Prosentase kenaikan Pendapatan Asli daerah	5.00	5.20	5.50	5.70	5.90	1.85	9.25	36.98	117.95

Dari table tersebut capaian kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Tujuan *"Meningkatnya Kemampuan Pengelolaan Pendapatan Daerah"*

  Indikator Prosentase PAD terhadap Pendapatan Tahun 2020 ditargetkan 14,80 realisasi 16,52 sehingga capaian kinerja 111,63, hal ini dapat dihitung dari realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020 sebesar Rp.402.079.432.451.38 dibanding realisasi Pendapatan Tahun 2020 sebesar Rp.2.435.129.246.169.38.

- Sasaran *"Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah"*

  Indikator Prosentase peningkatan PAD Tahun 2020 ditargetkan 5,20 realisasi 9,25 sehingga capaian kinerja 117,95. Hal ini dapat dihitung dari realisasi PAD Tahun sebesar Rp 402.079.432.451.38 dikurangi dari realisasi PAD Tahun lalu (2019) sebesar Rp 323.045.177.742,28 sehinnga selisih Rp 33.807.195.973.10.

Dari uraian tersebut diatas capaian kineja Badan Pendapatan daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 "tercapai " dan factor – factor yang mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran tersebut dintaranya :

- Optimalisasi penggunaan Sistem Pengelolaan pendapatan
- Optimalisasi penagihan pajak
- Optimalisasi pendataan pajak baru
- Pembayaran Pajak secara online.

Bahwa dalam mencapai kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk didukung oleh program dan kegiatan yang sesuai dengan Renstra Tahun 2018-2023. Program dan kegiatan Bapenda Kabupaten Nganjuk sesuai dengan Renstra

Tahun 2018-2023 mengalami perubahan pada tahun 2020 dari 2 program menjadi 3 program :

1 Program Penyusunan dan Pendokumentasian Pajak d an Retribusi Daerah;

2 Program Pembinaan Penagihan Pajak dan Retribusi daerah dirubah

Berubah menjadi 3 program yaitu :

1. Program Pendataan dan Penetapan Pendapatan Daerah;
2. Program Penagihan dan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan;
3. Program Pengawasan dan Penyuluhan Pajak dan Retribusi Daerah

Realisasi anggaran pelayanan sebagaimana tabel T-C 24 di bawah ini :

Tabel T-C 24

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Nganjuk

Program			Anggaran pada Tahun ke*)					Realisasi Anggaran SKPD Tahun ke*)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
2019	2020	2021	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19,00)	(20)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			604.252.900,00	610.705.200,00	-			582.032.930,00	550.163.531				96,32%	90,09%				1,06	(5,48)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			1.125.818.250,00	968.445.600,00				955.789.156,00	887.669.745				84,90%	91,66%				(13,98)	(7,13)
Program Peningkatan disiplin aparatur			21.762.000,00	-				21.673.800,00	-				99,59%	-				-	-
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			150.000.000,00	0				139.227.000,00	-				92,82%	-				-	-
Program Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan keuangan			20.500.000,00	14.057.400,00				19.777.000,00	13.380.600				96,47%	95,19%				31,43	0,32
Program Penyusunan dan Pendokumentasian Pajak dan Retribusi Daerah	Program Pendataan dan Penetapan Pendapatan Daerah		1.282.000.000,00	726.900.000,00				1.053.825.460,00	607.664.200				82,20%	83,60%				43,30	0,42
Program Pembinaan Penagihan Pajak dan Retribusi daerah	Program Penagihan dan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah		1.767.170.000,00	999.347.400,00				1.602.914.138,00	885.426.264				90,71%	88,60%				43,45	0,45
	Program Pengawasan dan Penyuluhan Pajak dan Retribusi Daerah			338.132.100,00					213.698.830					63,20%				-	-
		Perencanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			8.965.436.800,00					7.917.531.031,00					88,31%					
		Program Pengelolaan Pendapat Daerah			2.156.861.500,00					1.441.040.885,00					66,81%					
			4.971.503.150,00	3.657.587.700	11.122.298.300,00	-	-	4.375.239.484	3.158.003.170	9.358.571.916	-	-	88,01	86,34	84,14			105,25	(11,41)

*) dalam juta rupiah

Berdasarkan tabel tersebut diatas capaian realisasi pelaksanaan program kegiatan tidak bisa mencapai 100% dikarenakan :

- ✓ Penyesuaian sistem kerja ASN secara work from home (WFH) dengan shift.
- ✓ Efisiensi pengunaan APBD
- ✓ Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pertemuan rapat, sosialisasi
- ✓ adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang menyebabkan pembatasan kegiatan-kegiatan diantaranya pelarangan perjalanan dinas baik dalam daerah maupun luar daerah sehingga pelaksanaan sosialisasi perpajakan tidak bias dilaksanakan, pendataan, penagihan pajak juga tidak maksimal.
- ✓ Sumber daya Manusia yang kurang
- ✓ Tidak adanya tenaga IT

II.4. Tantangan dan Pengembangan pelayanan perangkat daerah

Tantangan dalam mengembangkan pelayanan memperhatikan hal-hal berikut :

1 **Tantangan :**

1. *Pesatnya perkembangan Sistem Informasi manajemen* Pendapatan berbasis Online
2. Kesadaran masyarakat dalam memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajak/retribusi daerah dengan benar masih rendah
3. Keterbatasan kuantitas dan kualittanganas SDM khususnya pemeriksa pajak dan juru sita untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan retribusi
4. Kurangnya kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi serta petugas pemungut dilapangan dalam memenuhi kewajibannya
5. Masih adanya data dan peta obyek pajak dan subyek pajak dan retribusi masih belum sesuai dengan kenyataan di lapangan
6. Masih rendahnya realisasi Pendapatan Asli Daerah

7. Masih banyak obyek pajak dan retribusi daerah yang baru yang belum terdata
8. Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan pajak dan retribusi yang cepat dan tepat.

2. PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH

Peluang yang dihadapi dalam masa lima tahun mendatang, pengembangan untuk pelayanan adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan dan penggunaan sistem penerimaan pajak daerah yang terintegrasi dan terpusat yang berbasis IT
2. Ketersediaan regulasi sebagai dasar pelaksanaan pemungutan Pendapatan Daerah;
3. Memiliki kewenangan dan tanggungjawab yang jelas.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi yang merupakan suatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun ke depan. Visi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk sesuai dengan Visi RPJMD 2018-2023 "TERWUJUDNYA KABUPATEN NGANJUK YANG MAJU DAN BERMARTABAT" dengan Motto "NGANJUK NYAWIJI MBANGUN DESO NOTO KUTHO"

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya. Misi Bapenda Kabupaten Nganjuk sesuai dengan RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 masuk pada Misi kedua yaitu *Meningkatkan kinerja birokrasi bersih, profesional, dan accountable demi masyarakat Kabupaten Nganjuk yang efektif dan efisien melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan.*

Dalam RPJMD Tahun 2018-2023 memuat Tujuan Meningkatnya birokrasi pemerintahan daerah yang profesional dengan karakteristik berintegritas, berkinerja tinggi dan bersih dan Sasaran Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik dengan Indikator no 2 yaitu Rasio kemandirian keuangan daerah, maka untuk mencapai Visi, misi, tujuan dan Sasaran RPJMD 2018-2023 tersebut Badan Pendapatan Daerah sebagai OPD Penunjang yang mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang pendapatan merumuskan tujuan *"Meningkatnya Kemampuan Pengelolaan Pendapatan Daerah"*, indikator *Prosentase PAD terhadap Pendapatan* dengan perhitungan Realisasi PAD dibanding Realisasi Pendapatan

dikali 100. Indikator *Prosentase PAD terhadap Pendapatan* merupakan indikator tujuan untuk mengukur tercapainya kemandirian keuangan daerah. Dengan meningkatnya Pendapatan Asli daerah (PAD) tiap tahunnya diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pemerintah daerah dalam mencukupi kebutuhan belanja dari dana transfer pemerintah pusat yang masih besar.

4.2 SASARAN

Guna mencapai tujuan Bapenda tersebut, maka Bapenda merumuskan sasaran yang akan dicapai yaitu *Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah* dengan Indikator *Prosentase peningkatan PAD* yang rumusan perhitungannya adalah Realisasi PAD Tahun berjalan dikurangi realisasi PAD Tahun lalu dibanding Realisasi PAD Tahun lalu dikali 100%. Dengan sasaran ini diharapkan dapat diketahui sejauh mana tingkat kenaikan PAD dari Tahun ke tahun, sehingga tujuan Bapenda yaitu kemampuan pengelolaan pendapatan daerah sejauh mana dapat tercapai.

Adapun tujuan dan sasaran Jangka menengah Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana tabel T-C 25 berikut :

Tabel T-C 25
Review Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	DATA CAPAIAN TAHUN AWAL	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Meningkatnya kemampuan Pengelolaan Pendapatan daerah	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase PAD Terhadap Pendapatan	402.347.144.361,43** 2.435.396.958.079,43***	14,71	14,80	16,60	16,70	16,75	16,75
			Prosentase kenaikan Pendapatan Asli daerah	368.272.236.478,28* 402.347.144.361,43**	5,00	5,20	8,00	8,25	8,50	8,50

* Realisasi PAD 2019
** Realisasi PAD 2020
*** Realisasi pendapatan 2020

BAB V
STRATEGI DAN KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi adalah sebagai pola tindakan yang dipilih untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tercapai guna mendukung tercapainya Visi, Misi dan tujuan RPJMD. Strategi mengarahkan seluruh sumber daya secara efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan mencermati isu isu strategis, permasalahan- permasalahan yang dihadapi, peluang, ancaman maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan.

Analisis terhadap lingkungan baik internal maupun eksternal diperlukan untuk dapat menentukan faktor-faktor penentu keberhasilan bagi suatu organisasi sehingga organisasi tersebut dapat selalu merespon setiap perubahan yang terjadi. Lingkungan *internal adalah kondisi internal yang dapat mempengaruhi* terhadap tercapainya kinerja organisasi, sementara lingkungan eksternal adalah situasi dan kondisi di sekitar organisasi yang secara langsung berpengaruh pada organisasi.

Srategi yang tepat merupakan syarat utama mencapai tujuan dan organisasi. Untuk dapat menyusun strategi yang tepat diperlukan dukungan data yang relevan, analisis lingkungan internal dan eksternal yang jujur dan kejelian dalam menentukan faktor faktor kunci keberhasilan.

Secara rinci strategi Badan Pendapatan daerah Kabupaten Nganjuk dalam berbagai kebijakan, program dan kegiatan sebagai keseluruhan cara atau langkah dengan perhitungan yang pasti untuk mencapai tujuan dan sasaran atau mengatasi persoalan yang dijabarkan dalam kebijakan kebijakan dan program program untuk lima tahun kedepan yaitu kemampuan keuangan daerah untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah melalui

Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber sumber Pendapatan daerah.

Dalam RPJMD Tahun 2018-2023 dimuat Strategi Meningkatkan tata kelola keuangan daerah (perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban) yang baik (transparansi, akuntabel, dan partisipatif), maka sesuai dengan Strategi RPJMD dimaksud dirumuskan strategi Bapenda Kabupaten Nganjuk untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut dalam 5 tahun kedepan adalah:

1 Meningkatkan kualitas SDM
2 Meningkatkan penyuluhan kepada masyarakat
3 Meningkatkan sistem penagihan yang mempermudah dan mempercepat WP membayar pajak
4 Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana
5 meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

5.2 KEBIJAKAN UMUM BAPENDA

Kebijakan adalah arah/tindakan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan yang pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang dipergunakan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan program/kegiatan.

Dalam RPJMD tahun 2018-2023 dimuat arah kebijakan Pelaksanaan integrasi perencanaan berbasis elektronik (*e-planning*) dan penganggaran berbasis elektronik (*e-budgeting*) serta pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Selaras dengan Arah kebijakan RPJMD dimaksud, maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk merurumuskan Arah kebijakan yang ditetapkan dalam 5 tahun

mendatang adalah untuk mencapai tujuan terselenggaranya pelayanan prima kepada masyarakat, yaitu :

1. Meningkatkan profesionalisme
2. Mempercepat realisasi pencapaian target pendapatan
3. Penerapan sistem informasi pendapatan terpadu

Strategi dan Arah Kebijakan Bapenda Kabupaten Nganjuk dalam 5 (lima) Tahun ke depan dapat dilihat dalam Tabel T-C 26 sebagai berikut :

Tabel T-C. 26
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI Mewujudkan Kabupaten Nganjuk Yang Maju dan Bermartabat dengan motto Nganjuk Nyawiji bangun deso noto kutho

MISI 2 Meningkatkan kinerja birokrasi bersih, profesional, dan accountable demi masyarakat Kabupaten Nganjuk yang efektif dan efisien melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kemampuan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	1 Meningkatkan kualitas SDM	1 Meningkatkan profesionalisme
		2 Meningkatkan penyuluhan kepada masyarakat	2 Mempercepat realisasi pencapaian target pendapatan
		3 Meningkatkan sistem penagihan yang *mempermudah* dan mempercepat WP membayar pajak	3 Penerapan sistem informasi pendapatan terpadu
		4 Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana	4 Mengadakan/menyediakan Sarana dan prasarana yang sudah rusak
		5 meningkatkan pelayanan kepada masyarakat	5 Penyelesaian pengajuan pelayanan tepat waktu

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN

Program dalam Rancangan review Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk disesuaikan dengan permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah dan Keputusan Mendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil verifikasi dan validasi pemuthakiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah serta merupakan program prioritas dari reviu *RPJMD 2018-2023* Kabupaten Nganjuk yang sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu sebagaimana yang tercantum dalam *rancangan reviu RPJMD, selanjutnya dijabarkan dalam rencana* program,kegiatan dan sub kegiatan. Pemilihan program, kegiatan, sub kegiatan didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Badan Pendapatan Daerah.

Indikator keluaran program merupakan indikator kinerja yang telah ditetapkan yang berisi outcome program. Outcome merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

Program merupakan kumpulan dari beberapa kegiatan, sub kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh Instansi dalam hal ini Badan Pendapatan daerah Kabupaten Nganjuk, guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Program untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai lima tahun kedepan adalah untuk mencapai sasaran Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan tujuan Meningkatnya Kemampuan Pengelolaan Pendapatan Daerah sebagai berikut :

1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**		
	1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		1.1.2	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.2.1	Sub Kegiatan Penyediaan *Gaji dan Tunjangan ASN*
		1.2.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
		1.2.3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD
	1.3 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.3.1	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
	1.4 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.4.1	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
		1.4.2	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
		1.4.3	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
	1.5 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.5.1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi *Listrik/Penerangan Bangunan* Kantor
		1.5.2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		1.5.3	Sub Kegiatan Penyediaan *Peralatan Rumah Tangga*
		1.5.4	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
		1.5.5	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

		1.5.6	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
		1.5.7	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
		1.5.8	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		1.5.9	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
1.6	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.6.1	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
		1.6.2	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		1.6.3	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
		1.6.4	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1.7	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.7.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		1.7.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		1.7.3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.8	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.8.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
		1.8.2	Sub Kegiatan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		1.8.3	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel
		1.8.4	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		1.8.5	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		
2.1 PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	2.1.1	Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah
	2.1.2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
	2.1.3	Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
	2.1.4	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
	2.1.5	Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
	2.1.6	Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
	2.1.7	*Sub Kegiatan Penilaian Pajak* Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Ha katas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
	2.1.8	Sub Kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah
	2.1.9	Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
	2.1.10	Sub Kegiatan Penelitian dan Verifikasi data Pelaporan Pajak Daerah
	2.1.11	Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah
	2.1.12	Sub Kegiatan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
	2.1.13	Sub Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
	2.1.14	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
	2.1.15	Sub Kegiatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah

Dari Uraian di atas program dan kegiatan dapat dilihat dalam Tabel T-C.27

Tabel T-C.27

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Nganjuk

NO.	Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME) DAN KEGIATAN (OUTPOT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN 2025	TAHUN 2026	TAHUN -1 2025		TAHUN -2 2026		TAHUN -3 2027		TAHUN - 4 2028		TAHUN - 5 2029		Kondisi Kinja pada akhir periode rencana Pemangkat daerah		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
								Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
1	2	3	4	5		7	8	14	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Meningkatnya kesampuan Pengelolaan Pendapatan daerah	**Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah**	**Persentase Kenaikan PAD**	**Program Administrasi Pelayanan**		Nilai IKM pelayanan pajak dan retribusi daerah	**80**		**80%**	**999.500.000,00**	**80%**	**887.000.000,00**							**160%**	**1.392.500.000,00**	**Bapenda**	**Bapenda**
				- Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Terlaksannya pengiriman surat menyurat keluar kota dan pembelian meterai	200		150srt	5.500.000,00	160 srt	6.000.000,00							310 surat	11.500.000,00	Bapenda	Bapenda
				- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Terpenuhinya pembayaran rekening Telpon, air, listrik dan internet	12		12 bl	190.000.000,00	12 bl	200.000.000,00							24 bulan	390.000.000,00	Bapenda	Bapenda
				- Penyediaan Jasa Keberihan Kantor		Tersedianya jasa keberihan gedung dan taman Bapenda	100		1paket	50.000.000,00	1paket	60.000.000,00							2 paket	110.000.000,00	Bapenda	Bapenda
				- Penyediaan Alat Tulis Kantor		Terlaksannya penyediaan ATK Kantor Bapenda	970,00		975	40.000.000,00	950	30.000.000,00							1.925	90.000.000,00	Bapenda	Bapenda
				- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Terlaksannya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	700.000		100.000 lbr	50.000.000,00	100.000 lbr	70.000.000,00							200000 lembar	120.000.000,00	Bapenda	Bapenda
				- Penyediaan Komponen alat listrik/penerangan bangunan kantor		Terpenuhinya jenis komponen instalasi listrik/bangunan kantor	95.000		10jenis	5.000.000,00	10jenis	6.000.000,00							20 jenis	11.000.000,00	Bapenda	Bapenda
				- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Tersedianya 4 macam surat kabar dan buku peraturan perundangan	48		1000 exemplar	6.000.000,00	1000 exemplar	6.000.000,00							2000 exemplar	12.000.000,00	Bapenda	Bapenda
				- Penyediaan Makanan dan Minuman		Tersedianya makanan dan minuman harian, rapat dan tamu dipda	100		3 kegiatan	50.000.000,00	3 kegiatan	60.000.000,00							6 kegiatan	110.000.000,00	Bapenda	Bapenda
				- Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah		Terlaksannya perjalanan dinas keluar daerah	50		15 kali	170.000.000,00	20 kali	180.000.000,00							35 kali	350.000.000,00	Bapenda	Bapenda
				- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan		Terlaksannya monitoring koordinasi dan evaluasi dalam daerah	54,14		10 kali	11.000.000,00	10 kali	11.000.000,00							20 kali	22.000.000,00	Bapenda	Bapenda
				- Pengadaan Perlatan dan Bahan Pembersih		Tersedianya perlatan dan bahan pembersih	150		175 bh	8.000.000,00	175 bh	8.000.000,00							875 bh	18.000.000,00	Bapenda	Bapenda
				Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur		**Prosentase sarana dan prasarana yg layak Bagi**	**90,00**		**90%**	**1.847.810.000**	**90%**	**775.180.000**							90%	0,00 **2.326.690.000,00**	**Bapenda**	**Bapenda**
				- Pengadaan kendaraan dinas/operasional		Tersedianya kendaraan dinas operasional	-		1 unit	400.000.000		-							1 unit	400.000.000,00		Bapenda
				- Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		Tersedianya jumlah perlengkapan gedung kantor	-		4 jenis	51.500.000	3 jenis	40.000.000							7 Jenis	91.500.000,00	Bapenda	Bapenda
				- Pengadaan Perawatan Gedung Kantor		Terpenuhinya perawatan gedung kantor	-		18 unit	557.950.000	13 unit	300.000.000							31 unit	857.950.000,00	Bapenda	Bapenda
				- Pengadaan mebelair		Tersedianya mebelair untuk Kantor	-		8 unit	45.000.000	5 unit	25.000.000							13 unit	70.000.000,00	Bapenda	Bapenda
				- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		Terlaksannya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	100		1 gedung	160.000.000	1 gedung	64.000.000							100%	224.000.000,00	Bapenda	Bapenda
				- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		Terlaksannya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	100		17 kend	165.000.000	17 kend	170.000.000							100%	335.000.000,00	Bapenda	Bapenda
				- Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor		Terlaksannya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	100		10 unit	25.000.000	10 unit	26.180.000							100%	51.180.000,00	Bapenda	Bapenda
				- Pemeliharaan rutin/berkala perbaikan gedung kantor		Terlaksannya pemeliharaan rutin/berkala perawtan gedung kantor	40		35 unit	140.060.000	40 unit	150.000.000							100%	290.060.000,00	Bapenda	Bapenda
				- Pemeliharaan rutin/berkala meubelair		Terlaksannya pemeliharaan rutin/berkala mebelair	30		30 unit	3.000.000	30 unit	3.000.000							100%	6.000.000,00	Bapenda	Bapenda
				Pelayanan Disiplin aparatur		**Meningkatnya Disiplin Aparatur**	**80**		**80%**	**23.028.000**	**90%**	**25.000.000**							0,95	48.028.000,00		

NO.	Tahun	Sasaran	Indikator Sasaran	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN 2018	TAHUN 2016	TAHUN -1 2019		TAHUN -2 2020		TAHUN -3 2021		TAHUN -4 2022		TAHUN - 5 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra Perangkat daerah		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
								Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET7	Rp.	TARGET	Rp.		
1	2	3	4	5		7	8	14	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				- Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya		Terpenuhinya pakaian dinas beserta kelengkapannya			146	23.025.000	146	25.000.000							292	48.025.000,00	Bapenda	Bapenda
																				0,00		
				Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		**Jumlah PNS yg memahami tig tata kelola penatausahaan keuangan dan perpajakan daerah**	**90,00**		**98%**	**210.000.000**	**96%**	**230.000.000**							0,92	**490.000.000,00**	**Bapenda**	**Bapenda**
				- Pengembangan wawasan pengelolaan keuangan daerah		Terlaksannya pengiriman karyawan untuk mengikuti bintek/sosialisasi/ workshop	8,00		52 org	160.000.000	52 org	160.000.000							100%	**320.000.000,00**	Bapenda	Bapenda
				- Peningkatan penatausahaan dan ketatalaksanaan kearsipan		Terlaksananya penataan kearsipan Bapenda	100,00		350 arsip	50.000.000	350 arsip	60.000.000							100%	**110.000.000,00**	Bapenda	Bapenda
																				0,00		
				Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		**% laporan kinerja dan laporan keuangan yang disusun dengan baik**	**100,00**		**100%**	**30.800.000**	**100%**	**30.800.000**							100%	**41.000.000,00**	**Bapenda**	**Bapenda**
				- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Tersusunnya LKIP, LKIP, Laporan triwulan, LPPD dan Renja	10		9 laporan	15.000.000	9 laporan	15.000.000							9 laporan	**30.000.000,00**	Bapenda	Bapenda
				- Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran		Tersusunnyalaporan prognosis realisasi anggaran dan semesteran	2		1 laporan	2.500.000	1 laporan	2.500.000							2 laporan	**5.000.000,00**	Bapenda	Bapenda
				- Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun		Tersusunnya laporan keuangan SKPD	10		1 laporan	3.000.000	1 laporan	3.000.000							2 laporan	**6.000.000,00**	Bapenda	Bapenda
																				0,00		
				Pendataan dan Penetapan Pendapatan Daerah		**Jumlah Penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**	**595000**		**595000WP**	**1.890.000.000,00**	**600.000WP**	**1.890.000.000,00**							604.000WP	**3.780.000.000,00**	**Bapenda**	**Bapenda**
				- Pendataan Obyek Pajak Daerah		Terlaksananya Pendataan Obyek Pajak Daerah yang baru	250		250 OP	160.000.000,00	250 OP	160.000.000,00							500 OP	**320.000.000,00**	Bapenda	Bapenda
				- Pemutakhiran data PBB-P2		Terlaksananya pemutakhiran data PBB-P2	2.500		3000 OP	500.000.000,00	3000 OP	500.000.000,00							6,000 OP	**1.000.000.000,00**	Bapenda	Bapenda
				- Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)		Terlaksananya penerbitan SPPT, DHKP PBB-P2 dan pemutakhiran peta blok.	586.000		586.000 WP	600.000.000,00	586.000 WP	600.000.000,00							586.000 WP	**1.200.000.000,00**	Bapenda	Bapenda
				- Penetapan dan pendistribusian SKPD dan SKRD		Terlaksanakannya SKPD, SKRD dan SPTPD	635.500		600.000 WP	80.000.000,00	600.000 WP	80.000.000,00							600.000 WP	**160.000.000,00**	Bapenda	Bapenda
				- Implementasi SIMDA Pendapatan		Terwujudnya sistem pengelolaan pendapatan	1,00		1 paket	250.000.000	1 paket	250.000.000							1 paket	**500.000.000,00**	Bapenda	Bapenda
																				0,00		
				Penagihan dan Pemeriksaan Pendapatan Asli Daerah		**Realisasi PAD**	89 Milyar		352.611.522.135	1.150.000.000,00	399.402.646.999	1.160.000.000,00							##########	**3.810.000.000,00**		
				- Peningkatan penerimaan pajak dan retribusi Daerah		Prosentase Capaian Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi	100,00		100,00%	600.000.000	100,00%	600.000.000							100%	**1.200.000.000,00**	Bapenda	Bapenda
				- Intensifikasi Penagihan Pajak Daerah		Prosentase Capaian realisasi penagihan piutang Pajak Daerah	60,00		40%	510.000.000	45,00%	510.000.000							100%	**1.020.000.000,00**	Bapenda	Bapenda
				- Penyelesaian keberatan, Pengurangan dan Pembatalan		Terselesaikannya permohonan keberatan, pengurangan dan pembatalan	75,00		80 WP	40.000.000	75 WP	50.000.000							155 WP	**90.000.000,00**	Bapenda	Bapenda
				Program Pengawasan dan Pengendalian Pajak dan Retribusi Daerah		**Prosentase WP yang Patuh**	**40,00**		**40,00%**	**665.000.000,00**	**45,00%**	**675.000.000,00**							100%	**1.140.000.000,00**	Bapenda	Bapenda
				- Pelayanan Pajak Daerah		Terwujudnya pelayanan yang efektif dan efisien	7.000		7500 WP	225.000.000,00	8000 WP	180.000.000,00							15500	**405.000.000,00**	Bapenda	Bapenda
				- Sosialisasi Pajak Daerah		Terlaksananya penyuluhan pajak daerah	1.000		4 kali	200.000.000,00	4 kali	220.000.000,00							8 kali	**420.000.000,00**	Bapenda	Bapenda
				- Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah		Meningkatnya potensi obyek pajak dan obyek retribusi	2.500		2.900 WP	100.000.000,00	3.000 WP	110.000.000,00							5900 WP	**210.000.000,00**	Bapenda	Bapenda
				- Pengawasan Pajak Daerah		Terwujudnya pengawasan atas kepatuhan wajib pajak daerah	100.000		100.000 WP	60.000.000,00	105.000 WP	65.000.000,00							205.000 WP	**125.000.000,00**	Bapenda	Bapenda
																				10.747.216.000		

NO.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN 2018	TAHUN 2018	TAHUN -1 2019		TAHUN -2 2020		TAHUN -3 2021		TAHUN -4 2022		TAHUN - 5 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra Perangkat daerah		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
								Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
1	2	3	4	6		7	8	14	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				PROGRAM PERUBAHAN UNDANG PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perangkat Daerah**							**90%**	**9.362.186.000**	**90%**	**12.167.036.000**	**90%**	**15.816.886.000**	**270%**	**34.972.772.000,00**	**Bapenda**	**Bapenda**
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Terwujudnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dan evaluasi kinerja perangkat daerah**							**12 Dokumen**	**14.960.000**	**12 Dokumen**	**22.540.000**	**12 Dokumen**	**29.000.000**	**39 dokumen**	**66.480.000,00**	**Bapenda**	**Bapenda**
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terwujudnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat Daerah							5 dokumen	4.950.000	6 dokumen	7.590.000	6 Dokumen	10.000.000	18 dok	22.490.000,00	Bapenda	Bapenda
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							7 dokumen	10.000.000	7 dokumen	15.000.000	7 Laporan	19.000.000	21 dok	43.000.000,00	Bapenda	Bapenda
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Terwujudnya Dokumen administrasi keuangan Perangkat daerah yang disusun**	**Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah yang disusun**							**21 Dokumen**	**8.010.436.000**	**21 Dokumen**	**9.891.046.000**	**21 Dokumen**	**10.890.666.000**	**21 Dokumen**	**28.792.108.000,00**	**Bapenda**	**Bapenda**
				Penyertaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN							23 dokumen	7.905.086.000	45 Orang/bulan	9.875.086.000	45 Orang/Bulan	10.875.086.000	69 dok	28.748.258.000,00	Bapenda	Bapenda
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD							1 laporan	5.450.000	1 laporan	6.050.000	1 Laporan	5.500.000	3 lap	16.950.000,00	Bapenda	Bapenda
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD							18 Laporan	9.900.000	29 Laporan	10.000.000	29 Laporan	10.000.000	54 laporan	29.900.000,00	Bapenda	Bapenda
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Terwujudnya Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disusun**	**Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disusun**							**1 dokumen**	**8.970.000**	**1 Laporan**	**10.050.000**	**1 Laporan**	**9.500.000**	**3 dok**	**28.470.000,00**	**Bapenda**	**Bapenda**
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*							1 dokumen	8.970.000	1 Dokumen	10.050.000	1 Laporan	9.500.000	3 dok	28.470.000,00	Bapenda	Bapenda
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disusun							**5 Dokumen**	**201.000.000**	**5 Dokumen**	**201.000.000**	**5 Dokumen**	**210.000.000**	**24 dok**	**614.000.000,00**	**Bapenda**	**Bapenda**
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya*							45 orang	26.000.000	48 orang	26.060.000	45 Paket	27.000.000	100%	79.000.000,00	Bapenda	Bapenda
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan*							54 orang	175.000.000	54 Orang	170.000.000	54 Orang	180.000.000	100%	525.000.000,00	Bapenda	Bapenda
				Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian*							12 laporan	5.000.000	12 Dokumen	5.000.000	12 Dokumen	5.000.000	100%	15.000.000,00		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Tersedianya Fasilitasi dan Koordinasi Bagian Umum**	Fasilitasi dan Koordinasi Bagian Umum							**12 Kali**	**268.648.800**	**12 Paket**	**486.990.000**	**12 Paket**	**903.800.000**	100%	**1.344.648.800,00**	**Bapenda**	**Bapenda**
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan*							10 Jenis	4.000.000	10 Paket	6.000.000	10 Paket	6.500.000	30 jenis	16.500.000,00	Bapenda	Bapenda
				Penyediaan Peralatan rumah tangga	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket peralatan rumah tangga yang disediakan*							10 buah	2.500.000	10 Paket	5.000.000	10 Paket	2.500.000	30 buah	10.000.000,00	Bapenda	Bapenda
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket bahan logistik kantor yang disediakan*							55 Jenis	50.000.000	60 Paket	100.000.000	60 Paket	90.000.000	175 jenis	290.000.000,00	Bapenda	Bapenda

NO.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN 2018	TAHUN 2018	TAHUN -1 2019		TAHUN -2 2020		TAHUN -3 2021		TAHUN - 4 2022		TAHUN - 5 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
								Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
1	2	3	4	6		7	8	14	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				Pelayanan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan*							6 Jenis barang cetakan dan 115000 Lembar penggandaan	30.988.800	12 Paket	60.000.000	12 Paket	65.000.000	18 jenis brg cetakan dan 300,000 lbr penggandaan	**184.988.800,00**	Bapenda	Bapenda
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan*							1120 eks	5.400.000	12 Dokumen	6.900.000	12 Dokumen	7.000.000	3,360 eks	**19.900.000,00**	Bapenda	Bapenda
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*							8 jenis	6.000.000	12 Laporan	6.000.000	12 Laporan	6.500.000	38 jenis	**18.500.000,00**	Bapenda	Bapenda
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*							90 Kali	112.790.000	12 Laporan	250.000.000	13 Laporan	255.000.000	103 kali	**620.790.000,00**	Bapenda	Bapenda
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD*							510 Arsip	20.000.000	12 Dokumen	60.000.000	12 Dokumen	70.000.000	1,720 arsip	**155.000.000,00**	Bapenda	Bapenda
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Tersedianya barang milik daerah SKPD**	Jumlah barang milik daerah SKPD							**80 Unit**	**207.800.000**	**22 Unit**	**396.380.000**	**9 Unit**	**185.000.000**	**9 Unit**	**790.680.000,00**	**Bapenda**	**Bapenda**
				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan*									unit		Unit				Bapenda	Bapenda
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan*											1 Unit	38.000.000			Bapenda	Bapenda
				Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	*Jumlah paket mebel yang disediakan*							5 unit	97.500.000	8 Unit	20.380.000	Unit	-	10 unit	**77.880.000,00**	Bapenda	Bapenda
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan*							15 Unit	150.000.000	17 Unit	125.000.000	9 Unit	150.000.000	41 unit	**425.000.000,00**	Bapenda	Bapenda
				Pengadaan Aset tak berwujud	Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan									1 paket	280.000.000			1 paket	**280.000.000,00**	Bapenda	Bapenda
				Pengedilan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terlaksanaya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**							**3 Jasa**	**498.600.000**	**3 Jasa**	**846.800.000**	**3 Laporan**	**357.000.000**	**9 jasa**	**1.602.100.000,00**	**Bapenda**	**Bapenda**
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan penyediaan jasa surat menyurat*							110 benda berharga dan 40 kali pengiriman surat	3.000.000	110 benda berharga dan 40 kali pengiriman surat	6.500.000	110 benda berharga dan 40 kali pengiriman surat /LAPORAN	7.000.000	100%	**16.500.000,00**	Bapenda	Bapenda
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terediannya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan*							12 bulan	194.400.000	12 bulan	210.000.000	12 Laporan	210.000.000	100%	**614.400.000,00**	Bapenda	Bapenda
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terediannya Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan*							12 Bulan	301.200.000	12 Bulan	330.000.000	12 Laporan	340.000.000	100%	**971.200.000,00**	Bapenda	Bapenda
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***Terlaksananya barang milik daerah SKPD yang dipelihara***	**Jumlah barang milik daerah SKPD yang dipelihara**							**87 Unit**	**266.051.500**	**80 unit**	**614.100.000**	**87 Unit**	**459.000.000**	**87 Unit**	**1.339.151.500,00**	**Bapenda**	**Bapenda**
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terediannya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayar Pajaknya							19 Unit	124.431.500	19 unit	245.100.000	19 Unit	250.000.000	100%	**620.881.500,00**	Bapenda	Bapenda
				Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara							17 Unit	4.000.000	12 unit	4.000.000	17 Unit	5.000.000	100%	**13.000.000,00**	Bapenda	Bapenda
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara							20 Unit	97.600.000	22 unit	300.000.000	20 unit	140.000.000	100%	**537.600.000,00**	Bapenda	Bapenda
				Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi							1 Gedung	40.000.000	1 Unit	64.000.000	1 Unit	64.000.000	1 Unit	**168.000.000,00**	Bapenda	Bapenda
				PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		**Prosentase Peningkatan PAD**							**5,00%**	**2.550.000.000**	**5,25%**	**3.474.900.000**	**5,50%**	**3.421.400.000**	**5,50%**	**9.446.300.000,00**	**Bapenda**	**Bapenda**

NO.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN 2018	TAHUN 2016	TAHUN -1 2019		TAHUN -2 2020		TAHUN -3 2021		TAHUN - 4 2022		TAHUN - 5 2023		Kondisi Kerja pada akhir periode renstra Perangkat daerah		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
								Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
1	2	3	4	5		7	8	14	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				Pengelolaan pendapatan Daerah		**Presentase Peningkatan PAD**							**8,00%**	**2.850.000.000**		**8,25%**	**3.474.950.000**		**8,50%**	**9.446.300.000,00**	**Bapenda**	**Bapenda**
				Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Tersedianya Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana pengelolaan pajak daerah							750 OP	100.000.000	5 Dokumen	103.750.000	5 Dokumen	105.000.000	2 Dkumen	**308.700.000,00**	Bapenda	Bapenda
				Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Tersedianya Hasil Analis Pajak Daerah serta Terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah dokumen Hasil analis Pajak Daerah									1 analisa	200.050.000	Analisa		1 analisa	**200.000.000,00**	Bapenda	Bapenda
				Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah							4 kali	196.000.000	9 Laporan	220.050.000	10 Laporan	240.000.000	22 kali	**686.000.000,00**	Bapenda	Bapenda
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah							25 Jenis	500.000.000	23 Sarana dan Prasarana	511.050.000	23 Sarana dan Prasarana	611.000.000	23 Sarana dan Prasarana	**1.722.000.000,00**	Bapenda	Bapenda
				Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Tersedianya Data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah							20.000 OP	275.000.000	12 Laporan	250.050.000	12 Laporan	250.000.000	12 Laporan	**775.000.000,00**	Bapenda	Bapenda
				Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah							5 Sistem	200.000.000	2 Laporan	250.050.000	2 Laporan	250.000.000	2 Laporan	**700.000.000,00**	Bapenda	Bapenda
				Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Terpenuhinya Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Jumlah Objek Pajak yang dilesuaikan NJOP nya							2.800 OP	75.000.000	6.000 Obyek Pajak	190.450.000	6.250 Obyek Pajak	190.400.000	6.250 Obyek Pajak	**488.800.000,00**	Bapenda	Bapenda
				Penetapan Wajib Pajak Daerah	Tersedianya Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah							500.000 OP	75.000.000	24 Dokumen	200.050.000	24 Dokumen	200.000.000	18000 OP	**475.000.000,00**	Bapenda	Bapenda
				Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Tersedianya Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah							5.000 WP	100.000.000	3.500 Layanan	185.050.000	3.550 Layanan	190.000.000	21500 WP	**475.000.000,00**	Bapenda	Bapenda
				Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi							12 Laporan	544.000.000	12 Dokumen	639.800.000	12 Dokumen	650.000.000	12 Laporan	**1.933.800.000,00**	Bapenda	Bapenda
				Penagihan Pajak Daerah	Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah							3.900.000.000 Rupiah	200.000.000	12 Dokumen	550.050.000	12	550.000.000	100%	**1.300.000.000,00**	Bapenda	Bapenda
				Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Terlaksananya Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah							250 WP	35.000.000	9 Dokumen	60.050.000	9 Dokumen	50.000.000	805 WP	**185.000.000,00**	Bapenda	Bapenda
				Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Terlaksananya Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah							500.000 WP	50.000.000	12 Dokumen	100.050.000	12 Dokumen	125.000.000	100%	**275.000.000,00**	Bapenda	Bapenda
				Pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah									3 Laporan	15.000.000	Laporan		3 Kegiatan	**15.000.000,00**			
				Elektronifikasi Transaksi Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Upaya Mengubah Transaksi Tunai Menjadi Non Tunai	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi pemerintah Daerah									1 Laporan		4 Laporan	300.000.000					
				JUMLAH										**11.513.186.000**		**15.641.936.000**		**16.264.986.000**		**84.466.293.000**		

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

Drs. NUR SOLEKAN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 19661227 198602 1 001

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN

VII.1 Indikator kinerja pada dokumen ini terdiri dari IKU dan IKK

Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dalam REVIU RPJMD 2018-2023 Kabupaten Nganjuk memuat Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Rasio kemandirian keuangan daerah. Perumusan/penetapan Indikator kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk tidak mengalami perubahan. Hal ini untuk untuk mendukung pencapaian Visi dan misi RPJMD 2018-2023. Review Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 sebagaimana tabel T-C 28 dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) tabel T-C 29.

TABEL T-C 28

REVIEW INDIKATOR KERJA UTAMA

BAPENDA KABUPATEN NGANJUK

No	Indikator	Formulasi Perhitungan		Kondisi Kinerja Review Renstra	TARGET					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA
				Tahun 2020	Tahun -1 2019	Tahun -2 2020	Tahun -3 2021	Tahun -4 2022	Tahun -5 2023	
1	Persentase PAD Terhadap Pendapatan	Realisasi PAD / Realisasi Pendapatan	100%	402.347.144.361,43** / 2.435.396.958.079,43***	14,71	14,80	16,60	16,70	16,75	16,75
2	Prosentase kenaikan Pendapatan Asli daerah	Realisasi PAD tahun berjalan - Realisasi PAD Tahun lalu / Realisasi PAD Tahun lalu	100%	368.272.236.478,28* / 402.347.144.361,43**	5,00	5,20	8,00	8,25	8,50	8,50

* *Realisasi PAD 2019*

** *Realisasi PAD 2020*

*** *Realisasi pendapatan 2020*

Tabel T-C 29
INDIKATOR KINERJA KUNCI
BAPENDA KABUPATEN NGANJUK

No	Indikator	Formulasi Perhitungan		Kondisi Kinerja Review Renstra	TARGET					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA
				Tahun 0 2020	Tahun -1 2019	Tahun -2 2020	Tahun -3 2021	Tahun -4 2022	Tahun -5 2023	
1	Prosentase kenaikan Pendapatan Asli daerah	Realisasi PAD tahun berjalan - Realisasi PAD Tahun lalu / Realisasi PAD Tahun lalu	100%	368.272.236.478,28* / 402.347.144.361,43**	5,00	5,20	8,00	8,25	8,50	8,50

* *Realisasi PAD 2019*

** *Realisasi PAD 2020*

KESEPAKATAN KEPALA PERANGKAT DAERAH TERHADAP TARGET IKU DAN IKK DALAM RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2018-2023

Setelah dilakukan pembahasan pada tanggal 26 Oktober 2021 jam 13.00 s/d selesai, kami menyepakati Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 sebagai berikut:

BADAN PENDAPATAN DAERAH

No.	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Capaian		Target Capaian			Kondisi Akhir	Paraf Persetujuan
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023	
1	Rasio kemandirian keuangan daerah	%	14,46	14,49	16,88	17,5	18	18,5	18,5	

Nganjuk, 26 Oktober 2021
Mengetahui,
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Nganjuk

PEMERINTAH KABUPATEN BAPENDA NGANJUK

(Drs. NUR SOLEKAN, M.Si)
Pembina Utama Muda
NIP. 19661227 198602 1 001

BAB VIII
PENUTUP

Rancangan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparat Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pengelolaan keuangan, pelayanan kepada wajib pajak dan retribusi.

Rancangan Perubahan Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari visi dan misi Badan Pendapatan Daerah mengacu pada Review/Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2018-2023 Kabupaten Nganjuk. Dalam melaksanakan Rancangan Perubahan Rencana Strategis ini sangat diperlukan partisipasi, semangat dan komitmen dari seluruh aparat Badan Pendapatan Daerah karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Strategis ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.